

**MENDOBRAK REPRODUKSI DOMINASI MASKULINITAS
DALAM PENDIDIKAN AKUNTANSI: INTERNALISASI PANCASILA
DALAM PEMBELAJARAN ACCOUNTING FRAUD**

Achdiar Redy Setiawan
Universitas Trunojoyo Madura

Ari Kamayanti
Universitas Brawijaya

Abstract: Breaking reproduction of masculinity in accounting education: internalizing Pancasila in accounting fraud learning process. This article analysis the reproduction process of symbolic violence in accounting education. Symbolic violence may arise in the form of masculinity indoctrination, such as objectivity, by negating subjectivity. The imbalance between masculinity and femininity might cause accounting fraud. This article uses the *doxique* concept proposed by Pierre Bourdieu as analysis tool to detect traces of masculinity domination in accounting education, specifically in Accounting Fraud course in Trunojoyo University Madura (UTM). This course is chosen not only because it explains how fraud occurs but also how to prevent fraud through consciousness. In order to insert Pancasila values that are filled with femininity, the method is extended. A reconstruction of accounting fraud course is proposed as alternative value transfers as well as learning process in UTM. However, at the end, it is a complete consciousness that does not reflect masculinity-femininity duality that would be able to break masculinity domination.

Abstrak: Mendobrak reproduksi dominasi maskulinitas dalam pendidikan akuntansi: internalisasi Pancasila dalam pembelajaran *accounting fraud*. Artikel ini menelaah proses reproduksi kekerasan simbolik dalam pendidikan akuntansi. Kekerasan simbolik dapat muncul melalui indoktrinasi maskulinitas, seperti obyektifitas dengan mengabaikan subyektifitas. Ketidakseimbangan antara maskulinitas dan feminitas dapat mengarahkan pada terjadinya *accounting fraud*. Artikel ini menggunakan konsep *doxique* yang dicetuskan oleh Pierre Bourdieu sebagai alat analisis mendeteksi keberadaan jejak-jejak dominasi maskulinitas dalam pendidikan akuntansi khususnya pada mata kuliah *Accounting Fraud* di Universitas Trunojoyo Madura. Mata kuliah ini dipilih karena mata kuliah ini menjelaskan bagaimana *fraud* terjadi dan bagaimana mencegah *fraud* melalui kesadaran. Dalam rangka melakukan insersi nilai Pancasila, yang sarat dengan femininitas, maka analisis *doxique* perlu diekstensikan. Hasil rekonstruksi mata kuliah *Accounting Fraud* merupakan suatu alternatif pentransferan nilai-nilai dan model pembelajaran di Universitas Trunojoyo Madura (UTM). Namun pada akhirnya, kesadaran bahwa maskulinitas-femininitas sebenarnya merupakan kesadaran yang utuh tanpa dualitas adalah kunci pendobrak maskulinitas.

Kata Kunci: dominasi, maskulinitas, femininitas, ekstensi Bourdieu, utuh

*“Ditakdirkan bahwa pria berkuasa
Adapun wanita lemah lembut manja
Wanita dijajah pria sejak dulu
Dijadikan perhiasan sangkar madu”¹*

Ismail Marzuki

Ketika bangunan kita semakin tinggi,
Mengapa emosi kita semakin dangkal?
Ketika harta kita semakin banyak,
Mengapa kebajikan kita semakin berkurang?,
Ketika angkasa luar pun sudah ditaklukkan
Mengapa kebencian dan angkara murka masih sering mengemuka?

[Mungkin]
kata Capra,

kita telah terlalu saintifik dan kurang intuitif,
kita telah terlalu matematikal dan kurang artistik,
kita telah terlalu maskulin dan kurang feminin²,
kita telah terlalu material dan kurang spiritual.

(Diadaptasi dari Isworo, 2006)

Preamble

Dominasi maskulinitas dalam konteks sosial budaya telah mengakar begitu lama, yang menurut Bourdieu (2010), terjadi karena suatu proses reproduksi dan dianggap menjadi suatu kebenaran (*doxa*). Tak terkecuali dalam konteks keilmuan akuntansi. Akuntansi dalam segala aspeknya, mulai dari pendidikan secara teoritisnya hingga praksisnya di lapangan profesionalitasnya, hingga hari ini, masih menampakkan wajah maskulinitas yang mendominasi.

Salah satu ciri maskulinitas pada pendidikan akuntansi adalah terlalu besarnya fokus pada rasionalitas (James, 2008; Kamayanti, 2011). Hal ini juga didasarkan pada pengembangan keilmuan akuntansi masih didominasi paradigma positivis³, yang ruhnya merupakan rasionalisme. Bukti lain adalah *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 1 paragraph 34* yang juga memunculkan terma rasionalitas. Konsekuensi logis dari dominasi maskulinitas ini adalah bahwa: **pertama**, paradigma positivis menuntun para

¹ “Lirik lagu gubahan Ismail Marzuki pada tahun 1970-an dan dipopulerkan oleh suara emas Titik Puspita ini mengisyaratkan “pembenaran” bahwa kaum pria adalah berkuasa, dominan (*powerful*), sementara perempuan identik dengan terma lemah, lembut, ketidakberdayaan. Ini menunjukkan reproduksi budaya yang mendominasi. Namun dalam artikel ini, maskulinitas maupun femininitas yang dibahas bukanlah *gender* tetapi karakter maskulin dan feminin sebagaimana yang diungkapkan Reiter (2007) dan Capra (2007).

² Cetak tebal dari penulis

³ Lihat Setiawan (2011) dan Kamayanti (2010)

akademisi akuntansi mengembangkan keilmuan akuntansi sebatas untuk tujuan terbatas yaitu *to explain* dan *to predict* praktik akuntansi⁴. Rasionalisme meyakini bahwa kebenaran (*the truth*) dan pengetahuan (*knowledge*) diperoleh dari proses penginderaan serta proses berpikir deduktif (Rasyidin dalam *Tim Pengembang Pendidikan*, 2007:25). Paradigma positivis memiliki asumsi bahwa pengetahuan “hanya” dapat dibangun dari “..*hypothetico-deductive account of scientific explanation*” (Chua, 1986:611). Dalam asumsi paradigma ini, “...realitas empiris adalah eksternal dan objektif terhadap subjek. *Human beings* dicirikan sebagai *passive objects*, bukan sebagai perekayasa realitas sosial.” Dengan demikian, rasionalisme pada basis paradigma positivis dalam pengembangan ilmu akuntansi ini sangat mengagungkan objektivitas dan keterpisahan/keterlepasan antara objek dan subjek (*detachment*).

Konsekuensi logis **kedua**, sebagaimana dikutip Powell and Dimaggio (1997:63) Max Weber menyatakan bahwa rasionalisme menjadi penjara (*iron cage*) yang mengekang unsur kemanusiaan. Hal ini memiliki pengaruh pada etika akuntan. Misalnya, penggunaan etika profesi akuntan yang didominasi nuansa maskulin akan menekankan pada keterpisahan/keterlepasan (*detachment*) objektivitas, *impersonality* dan otonomi individual berlebihan (Reiter, 2007). Pada saat kondisi ini yang terjadi, etika akan mengesampingkan beberapa aspek feminitas (sebagai lawan maskulinitas) seperti *responsiveness*, *cooperativeness*, intuisi, spiritualitas dan religi. Dalam terminologi ajaran Tao, maskulinitas ini merupakan karakter “Yang”, sedangkan feminitas lekat dengan “Ying”. Tao mengajarkan agar Yin dan Yang berada dalam pola yang seimbang agar tercipta harmoni. Pada saat Yang lebih mendominasi atas Yin, kondisi ini dapat menyebabkan problematika sistemik (Capra, 2007: 9).

Tidak hanya pada substansi dan proses pendidikan. Maskulinitas juga tercermin pada pengelolaan institusi pendidikan. Maskulinitas dalam pendidikan akuntansi juga terletak pada kebutuhan untuk mendominasi (*need of domination*), sebagaimana disentil dalam lagu gubahan Taufik Ismail di awal tulisan ini. Pada titik ini, ikhtiar pendominasian merupakan hasil kolaborasi antara beberapa kuasa (*power*) institusional yang saling berkelindan: institusi pendidikan, pemerintah, ikatan profesi dan pasar (*market*). Di bawah kuasa institusi pendidikan, siswa dipaksa untuk menerima bahwa universitas atau sekolah merupakan satu-satunya tempat untuk belajar dan tindakan belajar (*act of learning*) tersebut adalah resultan tindakan pengajaran (*act of teaching*) (Illich, 2008: 40-58).

Pada lembaga pendidikan inilah proses pemroduksian nilai-nilai secara berkelanjutan terjadi (reproduksi), sehingga dengan demikian kebutuhan memperoleh pendidikan (di institusi pendidikan) adalah kebutuhan primer dan konstan. Pendidikan lantas menjadi ajang konsumsi masyarakat borjuis dan tidak dapat menyentuh realitas sosial (Setiawan, 2008: 118). Kebutuhan untuk mendominasi juga menyentuh level metode pembelajaran (*mode of learning*). Ilmu Akuntansi diberikan kepada peserta didik dalam pola yang Paulo Freire menyebutnya sebagai *anti-dialogic education*. Ini terdiri dari

⁴ Hal ini terjadi karena ciri *worldview* paradigma positif yang memang bertujuan untuk *to explain and to predict* (Burrell dan Morgan, 1979:26)

penaklukan (*conquest*), manipulasi, pembagian dan pengaturan serta invasi kultural. Freire (1972:133-137) menyatakan:

“The antidiological man, in his relations with other men, aims at conquering them-increasingly and by every means, from the toughest to the most refined, from the most repressive to the most solicitous (paternalism)...the oppressor... must divide it and keep it divided in order to remain in power”

Bentuk pendidikan anti-dialogis ini muncul dalam pendidikan berbasis buku teks (*textbook-based education*). Penelitian Davidson dan Baldwin (2005) menyimpulkan bahwa di AS, praktik pendidikan akuntansi 100% bertumpu pada *accounting textbooks*. Ditambah lagi kondisi bahwa tipe perkuliahan lebih disukai; situasi di mana dosen menganggap pengetahuan yang disampaikan adalah ‘kado/hadiah (*gift*)’ kepada siswa. Dalam praktiknya, Freire memaparkan (1972:58-59):

“...the teacher teaches and the students are taught; the teacher knows everything and the students know nothing; the teacher thinks and the students are thought about; the teacher talks and the students listen-meekly...”

Dalam konteks penelitian tentang pendidikan akuntansi, Tietz (2007) memberikan bukti empiris. Dia dengan gagah berani mengatakan bahwa maskulinitas begitu kuat menjelma dalam pendidikan akuntansi. Penelitiannya menunjukkan bahwa dalam mayoritas buku teks akuntansi, perempuan masih menduduki strata yang inferior di hadapan pria. *Stereotyping* atas posisi perempuan ini lalu juga terkuatkan argumentasinya melalui peran perempuan dalam profesi akuntansi yang relatif termarginalkan. James (2008) menegaskan hal yang serupa, tujuan pendidikan akuntansi menitikberatkan pada rasionalisme ekonomi yang didesain untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang berkembang. Dalam bahasa yang senada, Triuwono (2010) berujar, aspek rasionalitas (unsur maskulin) lebih mendapatkan sentuhan dibandingkan aspek emosional, mental dan spiritualnya (unsur feminin) pada pendidikan akuntansi.

Berpijak dari pendapat Tietz (2007), James (2008), Triuwono (2010) diatas, juga Mulawarman (2006, 2007) serta Kamayanti (2010) jelaslah sudah bahwa pendidikan akuntansi penuh sesak dengan karakter maskulinitas yang mendominasi. Maskulinitas ini mewujud mulai dari konten keilmuan akuntansi itu sendiri, hingga juga menyentuh metode pembelajaran yang direproduksi oleh institusi pendidikan melalui para pendidiknya. Efek tak terhindarkan berikutnya adalah keilmuan akuntansi dan pendidikan akuntansi yang berwatak maskulin ini tentu saja akan melahirkan produk-produk akuntan yang juga berwatak sama dengan yang diajarkan. Prototipe yang dihasilkan pendidikan akuntansi yang lebih menitikberatkan maskulinitas ini akan menghasilkan konsekuensi logis **ketiga** yang mewujud calon-calon akuntan yang bercirikan rasionalis, antroposentris/egois apatis, tidak peka keadaan sekitar (*impersonality*), objektif dan kering akan nilai-nilai spiritualitas [(Mulawarman, 2006, 2007), Triuwono (2010), Kamayanti (2010)]. Maka, tidaklah mengherankan kemudian, jika fenomena *fraud* yang melibatkan profesi akuntansi menyeruak ke permukaan begitu deras.

Tindakan *fraud* ini merupakan suatu akibat dari antroposentrisme, rasionalisme dan pengabaian terhadap nilai-nilai spiritualitas⁵.

Fakta yang ada mengungkapkan bahwa *accounting fraud* terjadi di mana-mana, di berbagai belahan dunia. Megaskandal yang melibatkan beberapa perusahaan raksasa di AS (Enron, World Com, Xerox dll) pada awal dekade 2000-an menyentak dunia. Kantor Akuntan Publik (KAP) terbesar dunia, Arthur Andersen, yang terlibat dalam pusaran skandal tersebut menjadi korban tragis. Kesalahan yang dibuat segelintir auditornya, khususnya yang terlibat dalam rekayasa fenomenal Enron, digeneralisasi menjadi kesalahan institusi. Tumbanglah seluruh jaringan Arthur Andersen di seluruh dunia akibat runtuhnya kepercayaan (*distrust*) masyarakat. Keseluruhan skandal ini, dengan demikian, menunjukkan pelibatan peran akuntan di dalamnya dalam konteks *accounting fraud* (Irianto, 2003,) yang ujungnya merusak citra profesi akuntansi secara keseluruhan.

Stiglitz (2006) dalam bukunya yang fenomenal bahkan mengalokasikan satu bab khusus yang dilabeli "Akal-Akalan Akuntansi". Isinya *membrejeti* dosa-dosa para akuntan di AS selama era 1990-an yang lalu berpuncak pada megaskandal Enron, Xerox dkk di awal dekade 2000-an. Bentuk-bentuk baru *fraud* bermunculan. Akuntan yang memiliki wewenang mutlak sebagai penyedia informasi akuntansi, justru menggunakannya untuk menyusun sebuah laporan yang menipu dan menyesatkan atas nama keserakahan, imbuh Stiglitz.

Dan, sejarah mencatat fenomena *fraud* yang terjadi di AS ini kemudian tidak merupakan kejadian tunggal. Rembetan kejadiannya menular ke belahan dunia yang lain, tak terkecuali Indonesia. Beberapa kasus *fraud* yang mencuat melibatkan perusahaan-perusahaan publik terkemuka. Sebut saja kasus PT. Kimia Farma dan Bank Lippo. Inimelibatkan KAP yang selama ini diyakini memiliki kualitas audit tinggi. Perusahaan telekomunikasi terdepan, PT. Telkom (Tbk) juga tersandung kasus yang melibatkan auditor KAP "Eddy Pianto & Rekan". Dengan tidak diakuinya laporan keuangan auditan PT. Telkom oleh SEC (pemegang otoritas pasar modal di Amerika Serikat), maka diwajibkan adanya audit ulang terhadap PT. Telkom oleh KAP yang lain. Masih ada pula kasus keterlibatan 10 KAP yang melakukan audit terhadap Bank Beku Operasi (BBO) dan bank beku kegiatan usaha, yang juga melibatkan KAP besar (Trisnaningsih, 2007). Terakhir, megaskandal Bank Century dan Gayus Tambunan juga mewarnai hiruk pikuk pemberitaan media 2-3 tahun terakhir.

Keseluruhan kasus yang menyembul ini sebenarnya menegaskan kembali pernyataan dari Chamber (2005: 5) bahwa: "*The biggest swindles in the financial world have always produced balance sheets audited by well-known firms of accountant*". Dalam skandal yang muncul, peran akuntan seperti halnya tidak bisa lepas dari kejadian tersebut

Kasus-kasus *fraud* yang menyembul ini bisa jadi merupakan fenomena gunung es. Di luar yang terungkap, ada lebih banyak lagi yang tak terungkap. Hal ini berkaitan dengan terminologi *fraud* yang memiliki penuh dengan aksi

⁵ Albrecht *et. al* (2009:33-34) mendedahkan tiga elemen kunci (*fraud triangle*) bagaimana *fraud* di sebuah organisasi dapat terjadi, meliputi: (1) adanya tekanan (*perceived pressure*), (2) adanya kesempatan (*perceived opportunity*), dan (3) cara untuk merasionalkan bahwa *fraud* dapat diterima (*rationalization*).

tersembunyi layaknya *clandestine*. ACFE (2010: 25) dalam studi global tentang *fraud* yang diberi judul *Report to The Nation* menegaskan bahwa: “*one of the primary characteristic of fraud is that it is clandestine, or hidden. Almost all fraud involves the attempted concealment of the crime*”.

Fraud juga memiliki nuansa *trickey*, menggunakan trik-trik pengelabuan aturan, mencari celah aturan untuk tujuan keuntungan tertentu, sebagaimana didefinisikan Albrecht (2009: 7) sebagai berikut:

“generic term, and embraces all the multifarious means which human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get an advantage over another by false representations. No definite and invariable rule can be laid down as a general proposition in defining Fraud, as it includes surprise, trickery, cunning and unfair ways by which another is cheated. The only boundaries defining it are those which limit human knavery”

Dengan demikian, *fraud* adalah sebuah *deception* yang mencakup beberapa elemen-elemen berikut: a) Sebuah representasi, b) tentang *material point*, c) yang mengandung kesalahan (*false*), d) dan kesengajaan (*intentionally*) dan kesembroan (*recklessly*), (e) oleh orang yang dipercaya (*believed*), f) dan dilakukan terhadap korban, g) yang mengakibatkan korban mengalami kerugian. *Fraud* sangat berbeda dengan *unintentional errors* pada unsur niatannya yang mengakibatkan pihak lain dirugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung pada *material point*. “Niatan” ini sebagaimana cirinya yang abstrak, termanifestasi pula pada bentuk tindakan *fraud* yang hampir selalu berupa usaha-usaha tersembunyi pengelabuan aturan.

Fraud secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam kriteria mereka yang melakukannya atas nama (*on behalf*) organisasi atau yang merugikan (*against*) organisasi (Albrecht 2009: 10). Kedua jenis *fraud* ini sama berbahayanya. Pelibatan profesi akuntansi dengan segala kecanggihannya akan menambah dampak destruktif tindakan *fraud* ini, baik dari sisi metode, modus operandi hingga besaran kerugian material dan immaterialnya. *Fraud* dapat memiliki implikasi (material dan non material) yang jauh lebih besar daripada “jumlah” (secara material) yang diketahui dari tindakan *fraud* itu sendiri ketika melibatkan fungsi akuntansi.

Profesi akuntansi sebenarnya telah merespon beragam kasus *fraud* tersebut dengan cepat. Mencuatnya rentetan megaskandal melahirkan *blessing in disguise*, berkah di balik bencana. Ini menjadi salah satu titik tolak perlunya pembuatan standar dan aturan yang lebih *rigid* bagaimana menjadikan peran akuntan lebih “bergigi” dan berintegritas. Pemerintahan Federal AS mereformasi undang-undang pasar modal, praktek pengauditan dan tanggung jawab manajemen pada perusahaan-perusahaan di pasar modal, salah satunya Sarbanes-Oakley Act, yang diantaranya mengatur penegakan independensi auditor (Irianto, 2003).

Dalam penegakan etika, beberapa negara juga mulai serius mengkodifikasikan standar etika bisnis dan profesi yang lebih “kuat”, khususnya pada profesi akuntan. Ada gelombang kesadaran etis di kalangan profesi akuntansi untuk memperbaiki diri dengan inisiasi nilai etika yang lebih kokoh, tidak semata berbicara tentang materialisme *an sich*. Di Indonesia, kebutuhan adanya etika sebenarnya telah lama menjadi pemikiran

para akuntan (Tuanakotta, 2007). Etika profesional bagi praktik akuntan di Indonesia disebut dengan istilah kode etik dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam kongresnya tahun 1973, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk pertama kalinya menetapkan kode etik bagi profesi akuntan di Indonesia. Kode etik ini kemudian disempunakan dalam kongres IAI tahun 1981, 1986, 1990, 1994, dan tahun 2001.⁶ Kode Etik IAI dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung-jawab profesionalnya.

Kalangan pendidikan akuntansi juga memberikan respon senada. Pendidikan etika dianggap penting untuk diintrodusir pada universitas-universitas secara konkrit ke dalam kurikulum (Ghaffari *et al*, 2002). Etika ditanamkan dan diinternalisasikan sejak perkuliahan sebagai langkah usaha penyadaran dan pencegahan sejak dini tindakan-tindakan *fraud*.

Usaha lain dalam rerangka pendidikan akuntansi adalah pembelajaran *fraud awareness*. Bentuknya adalah inisiasi mata kuliah baru yaitu *fraud accounting*⁷. Mata kuliah ini mulai diperkenalkan di beberapa perguruan tinggi sebagai mata kuliah wajib, sebut saja di Universitas Brawijaya (UB)⁸ dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM)⁹. Tujuan mata kuliah ini, sebagaimana diisyaratkan Irianto (2011), adalah untuk mendorong tumbuhnya kesadaran akan bahaya *fraud* dan atau korupsi dalam arti luas serta memberikan kesempatan untuk memiliki kemampuan dalam pencegahan, pendeteksian, dan investigasi atas beragam bentuk kecurangan (*fraud*).

Pertanyaan yang masih menyeruak adalah, dengan seperangkat respon yang ada tersebut, khususnya dalam konteks pendidikan akuntansi, mengapa kasus-kasus *accounting fraud* masih terjadi hingga kini? Dengan modus operandi dan sistematika *fraud* yang lebih canggih, melibatkan keahlian-keahlian profesi akuntansi pula di dalamnya. Tidak cukupkah internalisasi nilai-nilai etika profesi dan *fraud awareness* pada pendidikan akuntansi? Apa yang salah dengan internalisasi nilai melalui mata kuliah tersebut?

Sebenarnya beberapa peneliti telah memiliki jawabannya secara konseptual. Triyuwono (2010) menegaskan bahwa pendidikan akuntansi perlu memasukkan *Se Laen, Yang Lain*, yaitu berupa kecerdasan mental-spiritual. Bersama-sama dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual, kecerdasan mental-spiritual perlu didudukkan dalam posisi yang sama pentingnya dalam pendidikan akuntansi. Masih dalam tulisan yang sama, Triyuwono (2010) mencontohkan masuknya *se laen* pada kurikulum pendidikan akuntansi di UB dan UTM. Di UTM bahkan memiliki pola tersendiri, yaitu menawarkan tiga mata kuliah baru, yaitu Mentalitas, Kreativitas dan Sosiologi Kritis sebagai mata kuliah wajib pada S1 Akuntansi.

⁶Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) merilis Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang dinyatakan efektif berlaku pada 1 Januari 2010. Kode etik versi IAPI ini merupakan aturan lebih khusus (*lex specialis*) yang mengikat profesi akuntan yang berprofesi sebagai akuntan publik

⁷ Penamaan mata kuliah ini juga dapat disalingtukarkan dengan akuntansi forensik dan *fraud examination*

⁸ Menurut Irianto (2011), mata kuliah ini mulai diperjuangkan untuk diajarkan sejak tahun 2005

⁹ Sejak tahun 2010, SK Kurikulum Jurusan Akuntansi FE UTM

Dalam rangkaian tulisannya, Mulawarman (2006 dan 2007) juga menegaskan penting dan perlunya perubahan dalam pendidikan akuntansi. Mulawarman mengistilahkannya dengan pensucian pendidikan akuntansi. Pensucian alias purifikasi ini mendasarkan diri pada cinta. Dalam implementasinya, nilai cinta ini mewujudkan pada konsep *Hyperview of Learning* (HOL). Sebagai implementasi lanjutan, riset Mulawarman dan Ludigdo (2010) memberi contoh pula bagaimana mengintegrasikan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual pada mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi UB. Caranya adalah mensinergikan rasio dan intuisi menuju nilai spiritual dalam pembelajaran.

Irianto (2010) dalam bahasa yang senada juga menggarisbawahi perlunya nilai-nilai spiritualitas menyusup dalam pendidikan dan pengajaran akuntansi. Ketika fokus pembelajaran akuntansi lebih berorientasi pada transfer pengetahuan dan pembentukan kompetensi keilmuan dan kecakapan teknis, dan kurang di dalam pembentukan watak, karakter, akhlak dan kepribadian, maka dampak destruktif berupa *fraud* tak terelakkan dapat terjadi, tegas Irianto (2010).

Dalam penelitian panjang dan mendalam untuk disertasi doktoralnya, Kamayanti (2010) juga tiba pada simpulan bahwa pendidikan akuntansi, meminjam istilah Paulo Freire, perlu dan bahkan harus dibebaskan. Kamayanti (2010: 196-197) menawarkan *Extended Dialogic Methodology* (EDM) sebagai ikhtiar membebaskan pendidikan akuntansi dari maskulinitas, kolonisasi dan relativitas. EDM sebagai perluasan pendidikan dialogis ala Freire mengisyaratkan pola pembelajaran yang tidak hanya mengisi ruang intelektualitas (kognitif), namun juga aspek mental serta spiritualitas (nilai-nilai Ketuhanan).

Penelitian ini merupakan ikhtiar lanjutan dalam usaha meruntuhkan dominasi maskulinitas pendidikan akuntansi. Pada saat yang sama, usaha menyeimbangkannya dengan nilai-nilai feminitas juga dilakukan. Kami mengusung internalisasi Pancasila dalam usaha menyeimbangkannya. Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, kami percaya dan yakini memiliki nilai-nilai luhur bernuansa feminitas. Jika nilai-nilai Pancasila ini dapat terinternalisasi dengan baik, harapan munculnya calon-calon akuntan yang lebih bermartabat, seimbang otak dan hatinya, seimbang unsur maskulin dan femininnya, dapat teraih.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri jejak-jejak yang masih tertinggal terkait dominasi maskulinitas dalam pendidikan dan pengajaran akuntansi. Dalam keyakinan kami, dominasi maskulinitas ini menyumbang peran besar pada masih marak dan meluasnya *fraud* dalam dunia profesi akuntansi hingga detik ini.

Penelitian ini fokus pada pembelajaran mata kuliah *accounting fraud* di Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Trunojoyo Madura. Mata kuliah *accounting fraud* ini dipilih karena tidak hanya karena mata kuliah ini menjelaskan bagaimana *fraud* terjadi, namun juga bagaimana mencegah *fraud* dengan membangunkan kesadaran (*fraud awareness*). Mengingat strategisnya posisi, fungsi, peran dan tujuan pembelajaran mata kuliah *accounting fraud* ini dalam upaya preventif meminimalkan dampak destruktif *fraud* maka upaya memperbaiki pola pembelajaran mutlak diperlukan. Setelah mendedahkan masih munculnya dominasi maskulinitas, penelitian

ini akan mengajukan konstruksi pembelajaran *accounting fraud* yang lebih seimbang dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila.

Metode

Penelitian ini menggunakan konsep *doxique* yang dicetuskan oleh Pierre Bourdieu untuk mendeteksi keberadaan jejak-jejak dominasi maskulinitas. *Doxique*, menurut Bourdieu (2010:48) merupakan objektifikasi suatu pemahaman umum yang dianggap sebagai konsensus bersifat praktik, tentang makna segala hal yang bersifat praktik. Tindakan-tindakan pengakuan atas “praktik” tertentu ini (*doxique*), persetujuan atas *doxa* dan keyakinan tertentu, sesungguhnya merupakan bentuk kekerasan simbolik.

Kekerasan simbolik hadir begitu lembut, tidak terasa, tidak terlihat pada korban-korbannya (Bourdieu, 2010: 2). Pola penetrasinya pada dasarnya dilakukan dengan cara-cara yang melibatkan komunikasi dan pengetahuan, yang murni bersifat simbolik. Dalam kalimat lebih lugas, Bourdieu (2010:2) mengatakan bahwa kekerasan itu dilakukan dengan cara-cara penghinaan, pengakuan atau pada batas tertentu, dengan cara-cara perasaan yang bersifat simbolik.

Kata “simbolik” sendiri oleh Bourdieu diletakkan dalam definisi yang lebih luas. Alih-alih memperlakukannya dengan istilah “nyata”, atau “fisik”, Bourdieu (2010: 49) memberi tempat pada objektivitas pengalaman subjektif tentang relasi-relasi dominasi dalam rerangka teori materialis ekonomi harta simbolik. Struktur-struktur dominasi, lanjut Bourdieu, adalah “produk dari suatu kerja reproduksi tanpa henti (bersifat historis), dilakukan oleh beberapa agen tunggal dengan senjata-senjatanya seperti kekerasan fisik dan kekerasan simbolik.

Penggunaan konsep Bourdieu dalam melakukan pendobrakan telah dilakukan dalam penelitian-penelitian akuntansi. Shenkin dan Coulson (2007) menggunakan Bourdieu untuk membahas konsep akuntabilitas serta emansipasinya. Mereka memberikan argumen bahwa:

“Bourdieu implies that if the right attention is given to the symbolic dimension of capital, critical theory can be brought closer to realising its emancipatory potential. He sheds some more light on what this would entail by noting that the peripheries of discursive fields are more inclined to produce symbols than information ... Thus, Bourdieu implies that the discourses produced at the peripheries are incubators for knowledge that changes the way social agents communicate, appreciate, and act on cultural objects” (Shenkin dan Coulson, 2007:305).

Kekerasan simbolik muncul dalam bentuk yang paling lembut yaitu melalui indoktrinasi maskulinitas, seperti obyektifitas dengan mengabaikan subyektifitas, baik melalui nilai-nilai yang ditransfer dalam buku teks maupun melalui metode pembelajaran. Ketidakseimbangan antara maskulinitas dan feminitas memiliki konsekuensi logis yang disinyalir dapat mengarahkan pada terjadinya *accounting fraud*. Oleh karena itu, penelitian ini akan membedah teks dalam buku yang digunakan dalam mata kuliah *accounting fraud*. Jejak maskulinitas dalam praktik proses pembelajaran juga akan disari dari berbagai informan yaitu sang pengajar (Tukimah) dan dua peserta didik, mahasiswi bernama Tumirah dan Tuminem (semua nama informan bukan nama sebenarnya)

Ketidakseimbangan maskulinitas dan feminitas ini perlu dicarikan jalan keluar. Feminitas perlu didorong sebagai penyeimbang maskulinitas dalam pendekatan pembelajaran. Pada posisi ini, analisis *doxique* kekerasan simbolik tidak cukup, dan perlu diekstensikan. Kami mengajukan insersi nilai Pancasila, yang sarat dengan femininitas, sebagai penyeimbang maskulinitas.

Pancasila memiliki lima nilai utama yang lebih bernuansa karakter feminin. Sila pertama mensyaratkan bahwa harus ada nilai-nilai Ketuhanan yang merasuk dan menjadi jiwa segala urusan bangsa. Ruh dan spirit Ketuhanan ini menjadi landasan utama dan pertama. Melalui internalisasi nilai ketuhanan (spiritualitas) yang ajeg, maka transformasi diri dapat dengan mudah terengkuh. Spiritualitas adalah karakter feminin menurut Capra (2007:49). Cochrane (2005) menggarisbawahi bahwa spiritualitas sebenarnya membangunkan kesadaran akan keberadaan diri yang lebih tinggi/ *higher self*. Jika manusia sadar akan perannya dan keterkaitannya dengan Tuhan, maka perilaku yang tidak baik akan dapat dihindarkan, termasuk niatan melakukan *fraud*. Kesadaran ketuhanan akan mendorong para akuntan dalam setiap tindak tanduknya akan selalu di "jalan Tuhan".

Sila kedua berisikan nilai-nilai kemanusiaan dengan dua kata kunci, yaitu keadilan dan peradaban. Adil memiliki konsekuensi tentang terpenuhinya seluruh kepentingan-kepentingan *stakeholders* tanpa menegasikan kepentingan *stakeholder* tertentu. Sementara peradaban mengisyaratkan perlunya akuntan turut menjunjung adab dan etika dalam menjalankan profesinya. Dalam konteks ini, maka perbuatan *fraud* telah melabrak nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. *Fraud* menyebabkan ada hak orang lain yang dilanggar demi keuntungan pribadi atau golongan. Pada saat yang sama, tindakan *fraud* menabrak semua aturan formal (hukum), norma dan etika. Nilai kemanusiaan disini juga merupakan sinyal feminin karena karakter manusia Indonesia seharusnya bersifat utuh, dan tidak mengedepankan karakter maskulin yang menginginkan dominasi.

Sila ketiga Pancasila juga tak kalah krusialnya. Setiap warga bangsa wajib memiliki rasa nasionalisme dalam bingkai persatuan dan kesatuan NKRI. Tidak terkecuali profesi akuntan yang hidup dan mencari hidup di Indonesia. Tindakan *fraud* yang berupa korupsi uang negara misalnya, jelas merupakan penghinaan terhadap rasa kebangsaan. Pengakuan ke-Indonesiaan ini secara implisit sebenarnya secara tidak langsung juga bentuk pengakuan atas kedaulatan bangsa lain. Ini adalah anti maskulinitas, suatu cara untuk mendobrak dan melawan suatu penjajahan. Tidak boleh ada penguasaan, penjajahan, pendominasian negara satu atas negara lain atas nama apapun, termasuk keilmuan akuntansi.

Sila berikutnya, keempat, sarat dengan nilai kerakyatan dan demokrasi. Demokrasi yang dipilih sebagai cara yang paling pas untuk sistem pemerintahan dan perwakilan haruslah ditujukan guna menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Janganlah kemudian demokrasi ini diperalat untuk menciptakan tindakan *fraud* berjamaah, musyawarah untuk mufakat korupsi misalkan. Selain itu, nilai kerakyatan juga bermakna feminis dalam arti melawan antroposentrisme¹⁰, paham untuk menempatkan diri, individu

¹⁰ Nilai maskulinitas yang menurut misalnya Mulawarman (2006, 2007) dan Kamayanti (2010) harus dibongkar.

beserta keinginan dan atau keuntungannya sendiri di atas kepentingan bersama yang jauh lebih *masalah*.

Sila terakhir, profesi akuntansi perlu pula turut mengusahakan terciptanya keadilan sosial bagi semua. Akuntan tidak bisa berdiri pada menara gading, lepas dari realitas sosial sekitarnya. Menjadi pribadi yang tercerabut dari lingkungan (*detachment*), sebuah ciri karakter maskulin yang harus dibongkar. Nilai keadilan ini juga ditujukan untuk melawan *impersonality* sebagaimana diisyaratkan Reiter (2007).

Diantara lima sila yang terpampang tersebut, sebenarnya jika ditarik lebih jauh, semuanya berpusat pada sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Spiritualitas, Kesadaran Ketuhanan menempati tahta tertinggi kehidupan bangsa. Spiritualitas ini menjadi landasan yang mewarnai dan menjiwai internalisasi sila-sila yang lain. Ma'arif (2011:59) menegaskan:

“Bagi saya semua nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sangat jelas, tidak memerlukan serangkaian teori yang berbelit-belit untuk memahaminya. Sila pertama ”Ketuhanan Yang Maha Esa” telah memberikan landasan kuat bagi kehidupan beragama secara tulus dan autentik”

Para *founding father* bangsa sebagai peletak dasar berbangsa telah menyepakati bahwa Pancasila adalah landasan dan tujuan berbangsa. Abdulgani (1977:13) menegaskan bahwa lahirnya Pancasila mendahului lahirnya Negara Republik Indonesia. Rumusan Pancasila dalam Mukadimah UUD 1945 mendahului pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945. Faktor ini mengandung arti bahwa Negara harus dijiwai dan dipimpin oleh Pancasila. Pancasila, tegas Abdulgani (1977:13), adalah *leitomotive* (dorongan pokok) dan *leitstar* (bintang penunjuk jalan) yang menuntun perjalanan bangsa mencapai tujuannya.

Dan sampai detik ini, ketika NKRI masih menjadi harga mati, maka Pancasila seyogyanya juga menjadi ruh (*spirit*) berbangsa, termasuk dalam pendidikan akuntansi. Itulah alasan mendasar penelitian ini kemudian juga mengargumentasikan perlu dan pentingnya insersi nilai Pancasila menyusup dalam pembelajaran pendidikan akuntansi, khususnya mata kuliah *accounting fraud*. Hasil rekonstruksi mata kuliah *Accounting Fraud* merupakan suatu alternatif pentransferan nilai-nilai dan model pembelajaran di Universitas Trunojoyo Madura.

Jejak Dominasi Maskulinitas: Evidence 1 Textbooks

Mata kuliah *Accounting Fraud*¹¹ merupakan mata kuliah baru pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi UTM. Mata kuliah ini pada awal kemunculannya langsung ditetapkan sebagai Mata Kuliah Wajib berdasarkan SK Kurikulum terbaru tahun 2010. Seperti diutarakan Ketua Jurusan Akuntansi UTM, inisiasi mata kuliah ini untuk diberikan kepada mahasiswa dilandasi oleh dua pemikiran besar.

Pertama, memberikan pemahaman tentang berbagai bentuk *fraud* yang terjadi, khususnya yang berkaitan dengan dunia akuntansi. Setelah

¹¹Secara resmi, dalam SK Kurikulum, mata kuliah ini bernama Akuntansi Forensik. Namun secara substansial, pengampu mata kuliah ini juga menegaskan bahwa isinya sebagian besar tentang *accounting fraud*

pemahaman terbentuk, maka *fraud awareness* menjadi tujuan berikutnya. Pembentukan kesadaran tentang *fraud* ini menjadi *ultimate goal* pembelajaran mata kuliah ini. Dari sini dapat diharapkan pula penelitian-penelitian guna mengembangkan keilmuan akuntansi forensik menjadi lebih marak. Dengan sendirinya, secara keilmuan, pengarusutamaan *fraud awareness* dapat terengkuh pula.

Kedua, introdusir mata kuliah ini juga memiliki tujuan strategis terkait proyeksi input mahasiswa Magister Akuntansi Forensik FE UTM. Sejak tahun 2011, Jurusan Akuntansi FE UTM mendapat amanah kepercayaan berupa ijin Dirjen Dikti Kemendikbud untuk menyelenggarakan program studi Magister (S2) Akuntansi Forensik. Introduksi tentang *fraud* dan akuntansi forensik pada mahasiswa program Sarjana (S1) diharapkan dapat menggugah antusiasme mahasiswa S1 untuk mendalami studi tentang *fraud* ini pada jenjang pendidikan pascasarjana.

Untuk tujuan penelitian ini, analisis dilakukan terhadap perkuliahan mata kuliah *accounting fraud* yang diampu seorang dosen, sebut saja Tukimah (bukan nama sebenarnya). Sebagai langkah awal, kami masuk pada analisis terhadap silabus dan buku teks perkuliahan yang digunakan. Berdasarkan silabus, sesi pembelajaran kelas terdiri dari 14 kali pertemuan plus dua sesi untuk UTS dan UAS.

Sesi kelas sebelum UTS berisikan materi-materi sebagai berikut: (1) *introduction to forensic accounting*, (2) *fraud concept*, (3) *fraud method* (4) *fraud prevention* (5) *fraud detection* (6) *fraud investigation I* (7) *fraud investigation II*. Setelah sesi UTS pada pertemuan ke-8, sesi kelas dilanjutkan dengan pembahasan materi berikut: (9) *management fraud* (10) *other types of fraud I* (11) *other types of fraud II* (12) *money laundering* (13) *computer fraud* (14) kerugian keuangan negara (15) aspek legal penanganan *fraud* dan ditutup dengan UAS pada pertemuan terakhir.

Masing-masing materi tematik menggunakan buku teks yang telah ditetapkan oleh pengajar. Sebagian besar buku teks yang dipergunakan adalah buku teks asing berbahasa Inggris. Buku teks berbahasa Indonesia yang dipakai sebagai pendamping adalah buku karangan Tuanakotta (2010). Pemilihan buku-buku teks asing ini dijawab Tukimah dengan alasan berikut:

“saya terpaksa menggunakan buku-buku referensi asing ini karena materi *fraud* ini masih relatif baru dalam keilmuan akuntansi. Ini buku-buku teks dan materi-materinya saya dapat saat kuliah S2 saya di Australia. Selain itu buku teks yang dibuat akademisi Indonesia, walaupun ada, masih sedikit dan relatif belum lengkap dan memuaskan secara konten.”

Praktis hanya pada dua pertemuan terakhir (ke-14 dan ke-15) menjelang UAS yang rujukan referensinya berbahasa Indonesia. Itupun karena bahasannya terkait dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu untuk persoalan perhitungan kerugian keuangan negara dan aspek legal penanganan *fraud*.

Untuk mensiasati penggunaan buku teks asing ini, semenjak pertemuan ke-3, Tukimah melakukan modifikasi. Dia membuatkan mahasiswa resume dan *slidepower point* setiap mingguan, abstraksi dari beberapa literatur yang terkait dengan bahasan tiap minggunya. Lalu resume tersebut dibagikan di

awal perkuliahan dalam bentuk *hardcopy*. Mahasiswa menggunakan resume tersebut sebagai rujukan.

Pemilihan sumber rujukan yang harus diacu oleh semua siswa di kelas dalam semua sesi pembelajaran merupakan kekerasan simbolik dalam perspektif Bourdieu. Nilai-nilai ditransfer melalui konten buku teks (yang telah diabstraksikan dalam bentuk resume) yang telah ditentukan sebelumnya. Ini bentuk paling lembut indoktrinasi maskulinitas, melalui pemilihan buku teks yang perlu dibaca, diperkenalkan dan didiskusikan di kelas.

Secara konten materi, pembelajaran *fraud* ini penuh dengan pengenalan definisi-definisi, pola-pola dan bentuk *fraud*. Pengajar lalu menyarikan definisi-definisi disarikan dari beberapa sumber rujukan dalam bentuk resume dan *slidepower point* yang disampaikan di dalam kelas. Pada semua sesi, hampir seluruh sesinya berisi tentang pengenalan tentang materi bahasan. Misalkan saja, pada pertemuan I, mahasiswa dikenalkan tentang apa itu akuntansi forensik, bagaimana metodologinya, lingkup dan cakupan akuntansi forensik dan seterusnya. Pada pertemuan II juga begitu. Konsep *fraud* diperkenalkan mulai dari definisi, pola dan bentuk-bentuknya dengan mengambil dari konsep yang tertulis di buku teks. Hal ini terus berlanjut pada pertemuan-pertemuan kelas sepanjang semester. Inilah pola pembelajaran yang Freire istilahkan sebagai pendidikan anti dialogis, mahasiswa menerima begitu saja kado/hadiah (*gift*) yang dipersembahkan oleh sang pengajar.

Penjara “definisi” seperti yang telah disadur dari buku-buku teks ini juga merupakan kekerasan simbolik. Mahasiswa terpatok dan terdoktrinasi dengan semua yang diajarkan oleh buku teks, sebab itulah yang merupakan pakem, sesuatu yang menjadi konvensi, “kesepakatan yang dibenarkan”. Pendefinisian lain di luar buku teks seakan menjadi hal yang tabu. Ketika dikonfirmasi terkait hal ini, Tukimah menjelaskan:

“Ya, itu kan sudah menjadi terminologi umum, *global language*. Ketika berbicara *fraud* di seluruh dunia ya selalu akan berbunyi demikian”

Terbukti, ketika ditanyakan kepada peserta didik, seorang mahasiswa bernama Tuminem, “apa *sih fraud* itu”? Dengan cepat, Tuminem menjawab, bahwa *fraud* adalah kecurangan. Begitu dikonfirmasi kembali bahwa penjelasan Tuminem hanya merupakan terjemahan saja, dengan kening agak berkerut, Tuminem lalu mencoba menjelaskan,

“*fraud* itu kecurangan yang disebabkan karena ada tiga hal, yaitu kesempatan, lalu.... *Hmmmm*.. Yang dua saya lagi saya lupa, Pak. Ada *kok* itu di buku dan resume yang dibuatkan oleh Bu Tukimah. Tentang contoh-contohnya juga banyak itu, tapi saya lupa”.

Mahasiswi lainnya, sebut saja Tumirah (juga bukan nama sebenarnya) menjawab senada:

“ya, intinya *fraud* itu ya kecurangan, Pak. Banyak caranya itu. Tapi saya juga lupa”.

Begitupun ketika saya tanyakan kepada Tuminem, apa bedanya *fraud* dengan korupsi. Dengan lugas Tuminem menyambar, “agak berbeda, Pak.” Ketika dicecar di mana letak bedanya, dengan teragap Tuminem tak mampu menjelaskan. Dengan lirih dia kemudian berujar,

“Sebenarnya itu sudah dijelaskan di kelas, Pak. Bahkan apa definisi korupsi berdasarkan undang-undang itu juga sudah disampaikan.. Intinya ada bedanya *lah*, Pak. Lupa saya..”, [pungkas Tuminem seraya tersenyum].

Contoh-contoh *fraud* yang diberikan pun mengikut apa yang termaktub dalam buku-buku teks tersebut. Celaknya, bentuk, pola dan modus *fraud* yang ada tersebut sebagian besar merunut pada teknik *fraud* yang relatif *sophisticated*, *advanced* di tataran global. Hal ini tidaklah mengherankan, karena di luar negeri penguasaan tentang cara-cara *fraud* sudah demikian canggih karena penguasaan teknologi informasi (TI) serta pola kecurangan (*fraud*) di atas rata-rata di Indonesia. Kasus-kasus di Indonesia juga disampaikan, namun juga yang tatarannya *advance*, seperti kasus aliran dana skandal Bank Bali di medio 1990-an yang alirannya berhasil digambarkan oleh auditor *Pricewaterhouse Cooper* (PwC) dalam skema yang mendetail. Sebenarnya pemberian contoh-contoh *fraud* dalam bentuknya yang *advance* ini tidaklah salah seluruhnya, namun mendekatkan contoh-contohnya dengan realitas keseharian mahasiswa akan lebih meningkatkan secara cepat *fraud awareness*.

Hal ini terbukti ketika saya tanyakan tentang kasus paling fenomenal yang menghantam kredibilitas dunia profesi akuntansi, Enron, Tuminem dan Tumirah tak mampu menjelaskan. Pun saat ditanyakan tentang kasus Bank Bali yang mengguncang Indonesia, kedua mahasiswi ini pun tak mengingat sedikitpun. Padahal, dua kasus besar ini (Enron di level global dan Bank Bali di level nasional) menjadi dua kasus yang di-*sounding* di Pertemuan I pada saat introduksi akuntansi forensik. Dua kasus ini muncul pula dalam *slide* awal yang dibagikan pula kepada mahasiswa. Ironisnya, cetusan Tumirah yang disampaikan dengan nada serius cukup menggelitik:

“Iya Pak, saya pernah dengar kasus Enron itu. Itu sekitar 2008¹² kan Pak. Heboh itu kasusnya ya, Pak. Tapi saya lupa dimana itu terjadinya. Yang pasti di luar negeri itu, Pak..”.

Jejak Dominasi Maskulinitas: Evidence 2 Learning Practices

Karakter maskulinitas yang mendominasi muncul pula jejaknya pada aspek praktik pembelajaran. Perkuliahan mata kuliah *accounting fraud* ini sebagian besar, untuk tidak mengatakan seluruhnya, menggunakan pola klasikal. Pengajar memberikan materi perkuliahan secara monolog di depan kelas. Mahasiswa menjadi audiens setia dengan pekerjaan utama adalah mendengar, mencatat dan bertanya jika ada topik bahasan yang masih kurang dapat dimengerti. Media bantunya berupa *slide powerpoint* yang dipancarkan melalui LCD *projector*.

¹² Padahal kasus Enron terjadi di AS sekitar tahun awal dekade 2000-an, sekitar tahun 2001-2002

Pengajar, dalam hal ini Tukimah, menjadi satu-satunya pemegang otoritas “kebenaran” dalam sesi kelas ini. Mahasiswa lainnya botol kosong¹³, yang lantas diisikanlah dengan tema-tema tentang *fraud accounting* setiap minggunya. Dosen “menyuapi” (*feeding*) mahasiswanya dengan pengetahuan yang telah dikuasai sang Dosen. Mahasiswa tinggal menerimanya dengan mendengarkan secara seksama penjelasan pengajar. Jika ada yang tidak dimengerti, tersedia pula sesi tanya jawab di kelas. Inipun merupakan bentuk kekerasan simbolik seperti yang dipaparkan Bourdieu (2010).

Mahasiswa tidak memiliki konsepsi apapun tentang materi pada minggu tersebut karena bahan ajar (berupa *hardcopy* resume dan *slide*) baru dibagikan di awal sesi perkuliahan dimulai. Tukimah beralasan, mengingat mata kuliah ini tergolong baru (pertama kali diajarkan di UTM), maka model pembelajaran klasikal inilah yang paling tepat digunakan. Lalu, mengalirlah sesi perkuliahan dengan pengenalan tentang definisi *fraud*, pola-pola dan modus *fraud*, *fraud prevention* *fraud detection*, *fraud investigation* dan seterusnya di bawah panduan sang pemilik otoritas “kebenaran”. Penjelasan Tukimah berikut menegaskan bahwa dalam perkuliahan *accounting fraud*, metode ceramah adalah yang paling tepat.

“Awal-awal perkuliahan, saya sempat memberikan fotokopi bab-bab tertentu dari suatu buku yang berkaitan dengan bahasan tiap minggunya. Lalu, mahasiswa diminta membuat rangkuman. Namun setelah membaca hasil rangkuman, saya pikir metode ini tidak efektif. Akhirnya, dengan agak bersusah payah saya buatkan saja *resume* setiap minggunya, juga *slide power point* sebagai pegangan mahasiswa. Ini saya berikan tiap minggunya. Di kelas, *slide* itulah yang kemudian saya jelaskan”

Pembelajaran klasikal (metode ceramah satu arah) serta menyandarkan diri pada konten-konten buku teks yang dirujuk berpotensi menghasilkan akuntan yang pasif, *inconfident accountants*. Mahasiswa hanyalah objek yang menyediakan dirinya mendengarkan segala hal ikhwal *fraud*. Mahasiswa mengalami pembiasaan untuk menerima apa saja yang akan “disuapkan” oleh sang pengajar.

Pada akhirnya, internalisasi konsepsi *fraud* beserta metode-metode turunannya jatuh tidak lebih ke dalam metode hafalan-hafalan. Contoh yang nyata terkait dengan kuatnya peran hafalan ini tampak pada soal yang diberikan saat UTS (Ujian Tengah Semester). Ada 3 (tiga soal): A, B dan C dengan sifat ujian *closed book*. Soal A (bobot 30%) berisi soal-soal definitif. Misalkan: a) apa yang dimaksud *fraud*?; b) sebutkan karakteristik *fraud*; c) jelaskan pemicu *fraud* menurut Cressey (*fraud triangle*) dan Bologna (*Gone Theory*), d) apa perbedaan antara *general audit* dan akuntansi forensik?; e) jelaskan metode-metode investigasi *fraud* dan f) jelaskan teknik-teknik investigasi *fraud*.

Soal B (bobot 20%) berisikan pertanyaan tentang bagaimana cara paling efektif untuk mencegah, mengurangi dan menghilangkan *fraud* dengan disertai contoh riil. Sedangkan soal C (bobot 50%) berisi sebuah kasus yang

¹³ Dalam istilah Freire (1972: 52) disebut *banking concept of education*

dipaparkan. Lalu mahasiswa diminta menunjukkan *fraud symptom* yang terdapat pada kasus tersebut, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendeteksi serta metode yang paling efektif untuk menginvestigasi *fraud* tersebut.

Keseluruhan contoh bentuk soal UTS ini menampakkan dominasi maskulinitas yang hanya menjejali ruang otak mahasiswa dengan konsep, definisi dan metode. Hal semacam ini merupakan salah satu kuasa yang menindas (Triyuwono, 2010), penjara (Kamayanti, 2010) dalam pendidikan akuntansi.

Jejak berikutnya nampak pada absennya aspek spiritualitas yang intensif dalam pembelajaran. Mata kuliah *accounting fraud* sebenarnya memiliki posisi strategis dalam memasukkan unsur kesadaran spiritual, sebuah kesadaran kebertuhanan. Tuhan perlu terus dihadirkan, termasuk saat proses pembelajaran. Ini merupakan usaha persisten untuk selalu mengisi ruang spiritualitas mahasiswa pada saat *menerima* bahasan tertentu terkait *fraud*. "*God should exist in rational, intuitive, critical, authoritative and in relative natures,*" tegas Kamayanti (2010: 203). Sayangnya, ini absen dalam pembelajaran *accounting fraud* ini.

Aspek penyadaran bahwa *fraud* itu berbahaya dan melanggar norma, etika, hukum dan aturan memang telah disampaikan, namun hanya dalam bentuk peringatan. Sebagai contoh, deretan kalimat yang disampaikan di kelas mengingatkan mahasiswa bahwa *fraud* itu laksana pisau. Pisau fungsi utamanya dipakai untuk hal kebaikan seperti mengiris dan memotong makanan. Namun, pada saat yang sama, di tangan orang yang tidak baik, pisau dapat berfungsi sebagai media untuk membunuh. Orang belajar *fraud* pun demikian. Ilmu tentang *fraud* ini bisa dipakai sebagai media untuk mencegah, mendeteksi dan mengurangi tindakan *fraud*, baik yang dilakukan oleh orang lain, lebih-lebih pada diri calon akuntan tersebut. Namun, ilmu tentang *fraud* dapat pula dipakai sebagai alat untuk lebih mempercanggih modus operandi *fraud* agar tidak terdeteksi. Tukimah menambahkan *tauisyah* ini dengan memberikan ilustrasi nyata yang dihadapinya.

"Saya ceritakan kepada mahasiswa tentang teman kuliah di Australia. Dia belajar tentang *fraud* di universitas. Siapa yang menyangka, ternyata figur yang kesehariannya tenang, relatif berwibawa, plus paras lumayan memikat, ternyata adalah salah seorang penjahat 'kerah putih' di Eropa sana. Dia mempelajari ilmu tentang *fraud* untuk lebih memahami celah aturan dan mempercanggih metode kejahatannya"

Bentuk-bentuk cerita dan "peringatan" seperti ini hanyalah mengisi ruang-ruang kognitif mahasiswa. Ikhtiar sebagaimana dicontohkan Triyuwono (2010), Mulawarman (2007) serta Mulawarman dan Ludigdo (2010) dapat memberikan pembelajaran langsung yang dapat pula mengasah aspek non-kognitif, yaitu rasa dan batiniah, aspek kecerdasan emosional dan spiritual. Ketika hanya aspek kognitif yang diasah, muara pembelajaran *accounting fraud* yaitu tumbuhnya kesadaran (*awareness*), yang secara *nature* adalah proses panjang dan lama, akan jauh panggang dari api. *Fraud* hanya dipahami sebagai tumpukan pengetahuan yang berisi definisi, metode-metode yang dibaca dan dihafal, lalu akan menguap entah kemana setelah perkuliahan selesai.

Internalisasi Pancasila Sebagai Solusi Menyeimbangkan Dominasi Maskulinitas

Sebagai solusi menyeimbangkan dominasi maskulinitas dalam pembelajaran mata kuliah *accounting fraud* ini, perlu adanya langkah menyeimbangkannya dengan memasukkan nilai-nilai feminitas. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila yang penuh dengan nilai-nilai feminitas dapat diusung sebagai bagian integral pembelajaran. Ini juga sebagai ikhtiar pengarusutamaan (*mainstreaming*) implementasi Pancasila dalam segala sendi kehidupan.

Pertanyaannya, mengapa Pancasila? Pancasila yang lahir secara konsepsi kenegaraan pada tahun 1945 dalam perkembangannya tetap menjadi satu-satunya landasan hidup yang disepakati. Bahkan hingga kini memasuki abad 21, abad teknologi informasi yang menjadikan dunia seakan tak terbatas lagi (*borderless*), Pancasila masih dan (mungkin) sangat relevan untuk menjadi panduan menghadapi beragam tantangan dan ancaman yang menghadang. Bahkan hingga UUD 1945 mengalami amandemen hingga empat kali, rumusan Pembukaan UUD 1945 (di mana Pancasila ada di dalamnya) tidak mengalami perubahan sedikitpun (Asshiddiqie, 2002: 1). Amandemen hanya merubah banyak hal di dalam Batang Tubuh. Dengan demikian, nilai Pancasila yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 ini tetap menjadi jiwa dan landasan bernegara.

Secara eksplisit, terma “Pancasila” memang tidak termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea keempat yang ditetapkan pertamakali pada 18 Agustus 1945. Namun formulasinya ada di dalamnya dan ditegaskan sebagai dasar tujuan bernegara. Berikut kutipan lengkapnya: ¹⁴:

“Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi sgenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Ketika Pancasila ini telah disepakati sebagai landasan bernegara, maka konsekuensi logisnya, maka Pancasila harus diamalkan secara objektif dan subjektif (Pasha, 1988: 51). Secara objektif bermakna bahwa Pancasila harus dijadikan dasar, sumber, dan jiwa seluruh pembuatan dan perumusan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan negara. Adapun pengamalan Pancasila secara subjektif merujuk pada pengamalan pancasila oleh orang-perorang selaku warga negara Republik Indonesia dalam

¹⁴ Garis bawah dari penulis untuk menunjukkan lima sila Pancasila.

kehidupan sehari-hari, baik secara individual, lebih-lebih sosial kemasyarakatan.

Jadi argumentasi bahwa internalisasi Pancasila dalam pendidikan akuntansi memiliki landasan kuat secara filosofis. Pendidikan Pancasila tidak cukup tertulis atau ada pada satu mata kuliah tertentu, namun sebaiknya terinternalisasi dan menjadi nyata melalui pembudayaan yang baik pada semua mata kuliah. Menurut Samani (2011:73), pembudayaan Pancasila dapat dilakukan melalui adanya teladan dari senior atau dosen, dilakukan secara konsisten dan lama serta memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kesadaran mahasiswa. Langkah selanjutnya adalah internalisasi agar Pancasila tidak menjadi sekedar retorika. Cara yang bisa ditempuh adalah melalui internalisasi dalam silabus dan proses pembelajaran.

Berdasar pembacaan terhadap nilai-nilai luhur yang diusung Pancasila ini, maka pembelajaran mata kuliah *accounting fraud* perlu diinternalisasikan nilai Pancasila. Mata kuliahnya dapat dinamakan dengan *Fraud* dan Akuntansi Forensik-Internalisasi Pancasila (FAF-IP). Metode pembelajarannya dapat meminjam apa yang telah berjalan baik di UTM pada mata kuliah Mentalitas, Kreativitas dan Sosiologi Kritis (Triuwono, 2010), atau dalam frekuensi yang senada seperti ditunjukkan dalam mata kuliah PEB-IESQ di UB (Mulawarman dan Ludigdo, 2010). Kontemplasi Rasa-Emosional dan Kontemplasi Batin-Spiritual dipergunakan bersamaan dengan Kontemplasi Pikir-Rasional. Yang membedakannya adalah indoktrinasi nilainya merujuk langsung pada nilai-nilai (feminitas) Pancasila.

Silabus materi dan bahasan tiap minggunya dapat tetap menggunakan silabus yang sekarang dipergunakan. Namun penekanannya tidak lagi sekedar untuk memenuhi kecerdasan intelektual (ruang kognitif), namun aspek rasa, mental dan spiritual yang lebih diarusutamakan. Pada titik ini, dominasi maskulinitas yang selama ini mengungkungi pembelajaran mata kuliah dapat diseimbangkan dengan internalisasi karakter feminitas via nilai luhur Pancasila. Internalisasi ini dilakukan, terutama pada saat mahasiswa diajak melakukan Kontemplasi Rasa-Emosional dan Kontemplasi Batin-Spiritual dalam sesi perkuliahan.

Sumber belajar alias referensi membebaskan mahasiswa untuk mencarinya sendiri sesuai topik bahasan. Sebagai panduan, pengajar dapat menginventarisir beberapa literatur yang dapat membantu mendapatkan pemahaman tentang materi tertentu. Beberapa diantaranya yang dapat disarankan antara lain: ACFE (*Association of Certified Fraud Examiner*). *Report to The Nation: An Occupational Fraud and Abuse* (2010); Tuanakotta, T.M. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif* (2010); Albrecht, et.al. *Fraud Examination*, (2006), Singleton, T.W. et.al. *Fraud Auditing & Forensic Accounting* (2006); Irianto, G. "Skandal Korporasi dan Akuntan", *Lintasan Ekonomi* (2003); Achsin, *Visum Akuntansi Forensik* (2010); E.R Hardjapamekas, *Audit Forensik Skandal Bank Bali*, *Majalah Tempo*, No.28/XXVIII/13-19 September (1999); E.R Hardjapamekas, *Skandal Akuntan: Kecelakaan Atau Keserakahan*, *Majalah Tempo*, No.20/XXXI/15-21 Juli hlm 1-3(2001); situs www.acfe.com; www.bpk.go.id dan lain sebagainya.

Selain referensi berupa karya tertulis seperti buku, jurnal dan situs di atas, menurut pemikiran kami, di beberapa sesi pertemuan, beberapa media lain akan dipergunakan pula sebagai sumber belajar, misalkan: film (durasi panjang maupun pendek), kartun, karikatur dll. Pemutaran media-media

audiovisual ini bisa di kelas atau ditonton di rumah masing-masing karena keterbatasan waktu. Proses perkuliahan juga tidak terpatok di dalam ruangan kelas. Ini juga sebagai upaya menghindari monotonnya pola pembelajaran. Ada beberapa film yang telah kami kantongki yang isinya relevan untuk mendobrak kesadaran mahasiswa untuk paham terhadap bahayanya *fraud*. Sebut saja, film *Wall Street*, *3 Idiot*, beberapa serial film pendek *Lie To Me*, *Kita vs Korupsi* produksi KPK RI dan lain-lain. Beberapa penugasan *on the spot* berupa observasi ke lapangan juga akan menjadi tugas-tugas yang menantang mahasiswa menyadari realitas senyatanya dalam kehidupan seputar hal ikhwal *fraud* ini. Hal ini akan memperkuat *attachment* kepada realita. Selain itu pemutaran film dan diskusi akan membebaskan proses pembelajaran dari pendidikan yang berbentuk *banking style*-antidialogis; menggali potensi kecerdasan mahasiswa secara utuh intelegensi, emosi, intuisi, sikap kritis serta spiritualitas mereka.

Kecerdasan yang utuh inilah yang akan terbentuk saat mahasiswa mendapatkan sisi maskulin dan feminin dalam proses pendidikan akuntansi. Kecerdasan yang utuh tanpa menegasikan maskulinitas dan femininitas merupakan hasil yang diharapkan agar mahasiswa atau calon akuntan akan dapat berperilaku dengan kesadaran penuh tentang nilai-nilai setiap tindakan. Perilaku ini artinya bersumber pada kesadaran akan ketuhanan, kemanusiaan dan peradaban, ke-Indonesia-an, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebagai konsekuensinya, silabus mata kuliah FAF-IP ini nantinya akan mewujudkan sebagaimana ditampilkan pada tabel 1.

Tabel 1. Internalisasi Pancasila pada FAF-IP

Sesi	Topik Bahasan	Sumber Belajar (Berkeutuhan)	Proses Pembelajaran (Berkeutuhan)	Internalisasi Nilai Pancasila (Prioritas)
I	Pengantar: Awal Pembelajaran, Pengenalan Metode dan Motivasi	Silabus FAF-IP + Film "3 Idiot"	Kontemplasi Rasa-Emosional & Kontemplasi Batin-Spiritual	Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Keindonesiaan, Nilai Kerakyatan, Nilai Keadilan Sosial
II	Introduksi: Akuntansi Forensik	Tuanakotta, Singleton <i>et.al</i> , Irianto, Hardjapamekas + Film dokumenter <i>Enron</i>	Kontemplasi Pikir-Rasional, Kontemplasi Rasa-Emosional & Kontemplasi Batin-Spiritual	Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Keindonesiaan, Nilai Keadilan Sosial
III	Konsepsi <i>Fraud</i>	Albrecht <i>et.al</i> , Singleton <i>et.al</i> , Tuanakotta + kunjungan dan wawancara dengan narapidana yang didakwa pelaku <i>fraud</i> (<i>attachment dengan realitas fraud</i>)	Kontemplasi Pikir-Rasional, Kontemplasi Rasa-Emosional & Kontemplasi Batin-Spiritual	Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan.
IV	Mengenali	ACFE, Albrecht <i>et.al</i> ,	Kontemplasi	Nilai Ketuhanan, Nilai

	Metode <i>Fraud</i> , Pelaku dan Alasan Terjadinya	Singleton <i>et.al</i> , Tuanakotta, Hardjapamekas, <i>case study</i> + film “ <i>Wallstreet</i> ”	Pikir-Rasional, Kontemplasi Rasa-Emosional & Kontemplasi Batin-Spiritual	Kemanusiaan.
V	Perang Terhadap <i>Fraud</i> I: Pencegahan <i>Fraud</i>	Albrecht <i>et.al</i> , Singleton <i>et.al</i> , Tuanakotta + Film “ <i>Kita vs Korupsi</i> ”	Kontemplasi Pikir-Rasional, Kontemplasi Rasa-Emosional & Kontemplasi Batin-Spiritual	Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Keindonesiaan, Nilai Kerakyatan, Nilai Keadilan Sosial
VI	Perang Terhadap <i>Fraud</i> II: Pendeteksian <i>Fraud</i>	ACFE, Albrecht <i>et.al</i> , Singleton <i>et.al</i> , Tuanakotta + 1 episode film serial “ <i>Lie To Me</i> ”	Kontemplasi Pikir-Rasional, Kontemplasi Rasa-Emosional & Kontemplasi Batin-Spiritual	Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Keindonesiaan, Nilai Kerakyatan, Nilai Keadilan Sosial
VII	Perang Terhadap <i>Fraud</i> III: Investigasi <i>Fraud</i>	Albrecht <i>et.al</i> , Singleton <i>et.al</i> , Tuanakotta + cuplikan film “ <i>Basic Instinct</i> ”	Kontemplasi Pikir-Rasional, Kontemplasi Rasa-Emosional & Kontemplasi Batin-Spiritual	Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Keindonesiaan, Nilai Kerakyatan, Nilai Keadilan Sosial
VIII	UTS			
IX	Perang Terhadap <i>Fraud</i> I: Investigasi <i>Fraud</i> (Konversi)	Albrecht <i>et.al</i> , Singleton <i>et.al</i> , Tuanakotta + atau 1 episode film serial “ <i>Lie To Me</i> ”	Kontemplasi Pikir-Rasional, Kontemplasi Rasa-Emosional & Kontemplasi Batin-Spiritual	Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Keindonesiaan, Nilai Kerakyatan, Nilai Keadilan Sosial
X	<i>Management Fraud: Financial Statement Fraud</i>	ACFE, Albrecht <i>et.al</i> , Singleton <i>et.al</i> , Tuanakotta + Puisi-puisi Akuntansi karya Pala Molisa, lagu “ <i>Bento</i> ” (Iwan Fals), “ <i>Bongkar</i> ” (Kantata Takwa) ¹⁵	Kontemplasi Pikir-Rasional, Kontemplasi Rasa-Emosional & Kontemplasi Batin-Spiritual. Disini bisa pula menambahkan <i>role play</i> di kelas	Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Keindonesiaan, Nilai Keadilan Sosial
XI	Tindak Pidana Korupsi (khususnya dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)	UU Tipikor, UU KPK, Achsin, <i>case study</i> + <i>content analysis</i> kasus-kasus yang tertulis di media massa koran, Majalah Tempo dll.	Kontemplasi Pikir-Rasional, Kontemplasi Rasa-Emosional & Kontemplasi Batin-Spiritual	Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Keindonesiaan, Nilai Kerakyatan, Nilai Keadilan Sosial

¹⁵ Untuk menunjukkan konsekuensi logis *fraud* terhadap keadilan sosial.

XII	Tindak Pidana Pencucian Uang	UU, <i>case study</i> + <i>content analysis</i> kasus-kasus yang tertulis di media massa koran, Majalah Tempo dll	Kontemplasi Pikir-Rasional, Kontemplasi Rasa-Emosional & Kontemplasi Batin-Spiritual. Disini bisa pula menambahkan <i>role play</i> di kelas	Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Keindonesiaan, Nilai Kerakyatan, Nilai Keadilan Sosial
XIII	Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	UU, <i>case study</i> + <i>content analysis</i> kasus-kasus yang tertulis di media massa koran, Majalah Tempo dll.	Kontemplasi Pikir-Rasional, Kontemplasi Rasa-Emosional & Kontemplasi Batin-Spiritual.	Nilai Ketuhanan, Nilai Keindonesiaan, Nilai Kerakyatan, Nilai Keadilan Sosial
XIV	Aspek Legal Penanganan <i>Fraud</i>	UU terkait, <i>case study</i> + <i>content analysis</i> kasus-kasus yang tertulis di media massa koran, Majalah Tempo dll, cuplikan film: "Alangkah Lucuya Negeri Ini"	Kontemplasi Pikir-Rasional, Kontemplasi Rasa-Emosional & Kontemplasi Batin-Spiritual	Nilai Ketuhanan, Nilai Keindonesiaan, Nilai Kerakyatan, Nilai Keadilan Sosial
XV	Penutup: Akhir Pembelajaran, Penekanan Pentingnya Kejujuran dan Integritas	<i>Fraud Awareness Introjection.</i>	Kontemplasi Rasa-Emosional & Kontemplasi Batin-Spiritual : Refleksi Diri yang Paripurna	Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan
XVI	UAS			

Catatan Perenungan

Seluruh paparan di atas menegaskan bahwa dominasi maskulinitas masih nampak jelas lekat dengan keilmuan dan pendidikan akuntansi. Karakter maskulin ini bercirikan penekanan berlebihan terhadap rasionalisme, kemampuan olah akal pikiran. Maskulinitas juga muncul dalam watak yang menumbuhkan hasrat untuk mendominasi: yang satu "memangsa" yang lain.

Dominasi maskulinitas ini telah menegasikan pengembangan watak feminin pada diri calon-calon akuntan yang akan dihasilkan oleh pendidikan (tinggi) akuntansi. Kecerdasan intelektual adalah satu-satunya yang disasar oleh pendidikan akuntansi dalam suasana dominasi ini. Unsur intuisi, rasa, emosi serta kesadaran Ketuhanan (spiritualitas) menjadi sesuatu yang terpinggirkan, termarginalkan (untuk tidak mengatakan dihilangkan sepenuhnya). Pendidikan bersandar penuh terhadap buku teks, pola pengajaran satu arah, penekanan berlebihan terhadap definisi dan konsep adalah pendidikan yang, meminjam istilah Freire (1972), tidak membebaskan. Sebuah pendidikan yang menghasilkan penjara (Kamayanti, 2010) dan penuh

dengan kuasa-kuasa yang menindas (Triyuwono, 2010). Kondisi seperti ini, tanpa disadari, sebenarnya merupakan kekerasan simbolik menurut pemikiran Pierre Bourdieu, sebuah kesadaran halus yang hadirnya seakan tidak terasa, namun berdampak destruktif luar biasa.

Efek destruktif yang tak terelakkan pada kondisi nirkeseimbangan ini berupa maraknya muncul kasus-kasus *fraud*, terutama yang melibatkan peran akuntan di dalamnya (*accounting fraud*). Rentetan kasus-kasus yang memuncak pada kasus Enron, Xerox, Wordcom dkk di awal dekade 2000-an yang telah menghancurkan citra profesi akuntansi adalah konsekuensi dan resultan pendidikan akuntansi yang didominasi karakter maskulinitas ini. Untungnya, menyeruaknya berbagai megaskandal yang melibatkan akuntan ini ini melahirkan *blessing in disguise*. Ada gelombang besar pemikiran untuk lebih menyeimbangkan dominasi maskulinitas dalam pendidikan akuntansi.

Penelitian ini mencoba mendedahkan bentuk dan pola pengajaran yang masih menampakkan wajah dominasi maskulinitas dalam pendidikan akuntansi. Mata kuliah *accounting fraud* yang kami pandang memiliki posisi strategis untuk pencegahan *fraud* oleh para calon akuntan keluaran universitas perlu dikonstruksi sedemikian rupa guna mencapai tujuan utama pembelajaran: terciptanya *fraud awareness*. Ikhtiar inisiasi nilai feminin yang kami usung agar mampu menyeimbangkan dominasi maskulinitas adalah dengan internalisasi nilai luhur Pancasila. Hasilnya adalah konstruksi mata kuliah FAF-PIP yang mengisyaratkan metode dan proses pembelajaran yang seimbang antara karakter maskulin dan feminin. Hal ini akan merekonstruksi proses reproduksi dalam pendidikan menjadi lebih utuh.

Internalisasi Pancasila sebenarnya merupakan kewajiban pada saat bangsa besar ini (masih) menganggap Pancasila sebagai landasan hidup, falsafah dasar bangsa Indonesia. Pengarusutamaan Pancasila sebagai pilar berbangsa ini wajib pula menyusup pada pendidikan akuntansi. Pola internalisasi nilai luhur Pancasila, yang penuh dengan nuansa femininitas, berikutnya juga dapat diinjeksikan pada mata kuliah lain yang diajarkan oleh pendidikan akuntansi.

Tujuan akhirnya adalah tumbuh dan menancapnya kesadaran (*consciousness*) sebagai manusia yang paripurna. Manusia yang seluruh kehidupannya seimbang, maskulin dan feminin, dalam naungan kesadaran ketuhanan yang berkesinambungan. Terma kesadaran transendental inilah yang akan membawa manusia, termasuk yang berprofesi akuntan di dalamnya, mampu menciptakan kedamaian di muka bumi. Dimulai dari kesadaran individu, berlanjut pada kesadaran kolektif komunitas. Dalam terminologi Islam, terciptanya kumpulan manusia-manusia *kaffah* inilah sebenarnya yang menjadi *ultimate goal* penciptaan manusia. Rahman (1999:29) membeberkan pentingnya *consciousness* ini dalam rangkaian kalimat berikut:

*“...in the case of the collective performance of **society**, both the final criterion of judgment upon it and the judgment itself transcend that society. When a man and society is fully **conscious** of this while conducting himself or itself, he or it has full taqwa. This idea can be effectively conveyed by the term “**conscience**”... That is why it is proper to say that “**conscience**” is central to Islam...when one speaks of the human response to the **ultimate reality**”*

Harapannya, potret buram profesi akuntansi yang penuh dengan gelimang *fraud* pada masa mendatang dapat berganti dengan wajah sejuk yang menentramkan dunia. Kesadaran yang utuh adalah kesadaran bahwa baik maskulinitas maupun femininitas perlu menjadi suatu kesatuan yang akan mencapai peradaban berketuhanan, berkemanusiaan, bernasionalisme, berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Semoga.

Wallahu'alam bi as shawaab

Daftar Rujukan

- Abdulgani, R. 1977, *Pengembangan Pancasila di Indonesia*, Idayu Press, Jakarta.
- ACFE (Association of Certified Fraud Examiner). 2010. *Report to The Nation: An Occupational Fraud and Abuse, 2010 Global Fraud Study*. ACFE Publishing.
- Albrecht *et.al* (2009), *Fraud Examination, Third Edition*, South Western, a part of Chengange Learning, USA
- Arthaud-Day, M. and J. P. Near. 2005. The Wealth of Nations and the Happiness of Nations: Why "Accounting" Matters. *Social Indicators Research*. Vol 74.p 511-548.
- Asshiddiqie, J, 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, FH UI, Jakarta.
- Bourdieu, P. 2010. *Dominasi Maskulin*. Terjemahan S.A Herwinarko. Jalasutra. Yogyakarta.
- Cohrane, K. 2005. Learning and Spirituality dalam *Spirituality and Ethics in Management*. Editor: Laszlo Zsolnai. Kluwer Academic Publisher.
- Capra, F. 2007. *The Turning Point: Titik Balik Peradaban, Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*. Translated. Penerbit Jejak. Yogyakarta.
- Chua, W.F. 1986. Radical Developments in Accounting Thought. *The Accounting Review*. Volume LXI No 4, October.p 601-632.
- Freire, P. 1972. *Pedagogy of The Oppressed*. Translated by Myra Bergman Ramos. Penguin Books. The United Kingdom
- Irianto, G. 2003. "Skandal Korporasi dan Akuntan", *Lintasan Ekonomi*, Vol. XX No. 2, Juli, hal. 104-14
- Irianto, G. 2010. Internalisasi Spiritualitas dalam Pendidikan Akuntansi. *Orasi Ilmiah* dalam rangka Wisuda Sarjana XI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Satya Dharma, Singaraja, 27 Desember 2010.
- Irianto, G. (2011), *Silabus mata kuliah Akuntansi Forensik dan Fraud Examination*. Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi Universitas Brawijaya.
- Illich, I. 2008. *Bebaskan Masyarakat dari Belenggu Sekolah*. Translated. PSH dengan Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Isworo, B. 2006. *Spiritualitas Bisnis dan Sebuah Proses Transendensi*. *www.kompas.com* (kolom edisi cetak harian Kompas tanggal 18 September 2006). diunduh tanggal 20 Maret 2012
- James, K. 2008. A Critical Theory and Postmodernist Approach to The Teaching of Accounting Theory. *Critical Perspective on Accounting*. Vol 19.p 643- 676.

- Kamayanti, A. 2010. Liberating Accounting Discussion Through Beauty and Love. *Disertasi*. Program Doktor Ilmu Akuntansi, FEB Universitas Brawijaya, Malang.
- Ludigdo, U. 2006. Strukturasi Praktik Etika di Kantor Akuntan Publik: Sebuah Studi Interpretif. *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Universitas Andalas, Padang.
- Ma'arif, A.S. 2011. "Dinamika Praktik Kehidupan Berpancasila di Masyarakat". *Proceeding Kongres Pancasila III*. Surabaya 31 Mei-1 Juni. pp 33-47
- Mulawarman, A.D. 2006. Pensucian Pendidikan Akuntansi. *Addressed at Konferensi Merefleksi Domain Pendidikan Ekonomi dan Bisnis.Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2 December*.
- Mulawarman, A.D. 2007. Pensucian Pendidikan Akuntansi Episode 2: Hyperview of Learning dan Implementasinya. *Addressed at The First Accounting Session Revolution of Accounting Education*. UKM Maranatha Bandung 18- 19 Januari.
- Mulawarman, AD. dan U. Ludigdo. 2010. Metamorfosis Kesadaran Etis Holistik Mahasiswa Akuntansi: Implementasi Pembelajaran Etika Bisnis dan Profesi berbasis Integrasi IESQ. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Vol. 1 No .3 Desember 2010.
- Pasha, M.K. 1988, *Pancasila, UUD 1945 dan Mekanisme Pelaksanaannya*, Mitra Gama Widya, Yogyakarta
- Rahman, F. 1999. *The Major Themes of the Quran*. Second Edition. Islamic Book Trust. Kuala Lumpur.
- Reiter, S. 1997. The Ethics of Care and New Paradigms for Accounting Practice. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol 10, No 2.p 299-324.
- Samani, M. 2011. "Pendidikan sebagai Wahana Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila". *Proceeding Kongres Pancasila III*. Surabaya 31 Mei- 1 Juni. pp 69-77
- Setiawan, AR. 2011. Tinjauan Paradigma Penelitian: Merayakan Keragaman Pengembangan Ilmu Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Vol. 1 No.3 Desember 2011
- Setiawan, B. 2008. *Agenda Pendidikan Nasional*. Jogjakarta: Ar-Ruz Media.
- Shenkin, M. dan A.B. Coulson. 2007. "Accountability through activism: learning from Bourdieu". *Accounting Auditing and Accountability Journal*. Vol 20. No 2. p 297-317.
- Stiglitz, J.E. 2006. *Dekade Keserakahan Era 90-an dan Awal Mula Petaka Ekonomi Dunia*. Terjemahan Aan Suhaeni. Marjin Kiri, Tangerang.
- Tietz, W. M. 2007. Women and Men in Accounting Textbooks: Exploring the Hidden Curriculum. *Issues in Accounting Education*. Vol 22, No. 3.p 459-480.
- Triuwono, I. 2010. "Mata Ketiga": Se Laen, Sang Pembebas Sistem Pendidikan Tinggi Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Vol. 1 No.1 April 2010
- Tuanakotta, T.M. 2007. *Setengah Abad Profesi Akuntansi*, Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Tuanakotta, T.M. 2010. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Lembaga Penerbit FEUI. Jakarta